Minyak Goreng Subsidi Langka, Bupati Minta Distribusi Langsung ke Desa

KUDUS - Guna memastikan bahan pokok stabil, Bupati Kudus Hartopo menyurvei Pasar Kliwon pada Senin (4/4). Hasilnya, minyak goreng subsidi masih susah dijumpai. Merespon kelangkaan tersebut, Hartopo meminta Kepala Dinas Perdagangan Kudus Sudiharti segera berkoordinasi dengan distributor.

Pemerintah Kabupaten Kudus akan segera mendistribusikan minyak goreng subsidi ke desa-desa untuk mengurangi kelangkaan. Mekanismenya sama seperti pendistribusian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dengan cara menyalurkan langsung ke masyarakat melalui pemerintah desa.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan distributor biar diagendakan seperti kemarin. Biar masyarakat mudah mengaksesnya," paparnya.

Selain minyak goreng, harga tepung terigu naik. Meskipun begitu kenaikan harga tepung terigu di Bulan Ramadan dinilai masih wajar. Sementara harga dan stok bahan pokok lainnya dipastikan aman.

"Harga bahan pokok relatif stabil. Tidak ada kenaikan drastis," ucapnya.

Selanjutnya, Hartopo meninjau kondisi Taman Krida pasca hujan disertai angin kencang pada Jum'at (1/4) lalu. Saat ditinjau, beberapa pohon tumbang masih dibersihkan dan atap bangunan di Taman Krida mengalami kerusakan.

"Kemarin waktu hujan dan angin kencang banyak pohon tumbang dan bangunan jebol," jelasnya.

Dirinya menjelaskan, perbaikan tidak bisa dilakukan melalui anggaran pemeliharaan. Pasalnya, anggaran tersebut di-refocusing untuk menangani kasus Covid-19. Hartopo meminta Plt. Kepala Disbudpar Kudus Mutrikah dan Kepala Disdikpora Kudus Harjuna Widada segera membuat nota dinas. Sehingga Rencana Anggaran Biaya (RAB) bisa disusun.

"Perbaikannya tak bisa lewat anggaran pemeliharaan. Nanti kita akan berdiskusi terlebih dahulu," ungkapnya.

Apabila APBD belum mencukupi, Hartopo akan menganggarkan pemeliharaan pada APBD perubahan tahun ini. Sehingga perbaikan segera dilaksanakan.

"Kalau memang belum mencukupi nanti kita ajukan di perubahan," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menegaskan agar setiap OPD proaktif dalam perawatan aset negara. Dirinya menjelaskan merawat aset sama saja dengan pengabdian terhadap negara.

"Aset negara harus dikelola dengan baik. Seperti mengelola aset sendiri. Jadi dinas harus proaktif," pungkasnya. (\*)